



**IMPLEMENTASI PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN  
JALAN KABUPATEN DI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA  
MARGA KABUPATEN MALANG**  
(Studi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  
2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Malang untuk memenuhi salah satu  
Prasyarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh  
**HILMI AINUL FAJAR**  
**NPM 218.01.09.1161**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2023**





## MOTTO

“Hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan “menunda-nunda” dan “berangan-angan panjang”, sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan.”

KH. Hasyim Asy'ari





## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hilmi Ainul Fajar  
Npm : 21801091161  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Judul : Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten  
Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang  
(Studi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik  
Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara  
Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan)

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. H.M. Mas'ud Said, MM., Ph.D  
NPP. 196403081990111001

Dr. Havat, S. AP., M.Si., CIQaR  
NPP. 121508198232196

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Administrasi Publik



F I A Suyeno, S.Sos, M.AP  
NPP. 150209198832135



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN  
KABUPATEN DI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  
KABUPATEN MALANG**  
(Studi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13  
Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan)


Oleh:  
**HILMI AINUL FAJAR**  
21801091161

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 2 September 2023  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Penguji

Tim Penguji

Anggota Penguji

  
**Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D.**  
NPP. 196403081990111001

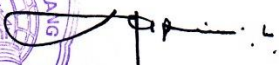
  
**Dr. Hayat, S.AP., M.Si., CIOqA**  
NPP. 121508198232196

Anggota Penguji

  
**Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP**  
NPP. 192209198632296

Malang, 2 September 2023  
Universitas Islam Malang  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Dekan



  
**Dr. Rini Rahayu Kurniati, M.Si**  
NPP. 1960200002



## PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

### PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menggugurkan skripsi ini dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, 2 September 2023  
Mahasiswa



Hilmi Ainul Fajar  
218.01.09.1161

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua Bapak Mustolik, Ibu Cami Nur ‘Aini yang selalu mendoakan, selalu memberikan support penulis sejak kecil sampai saat ini dan selalu mendukung penulis dalam segala hal yang positif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si selaku Rektorat Universitas Islam Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Islam Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Rini Rahayu, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.



4. Suyeno, S.Sos., M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Malang yang telah memberikan motivasi, arahan kepada mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Malang.
5. Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah berkenan memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Hayat, S.AP., M.Si.,CIQaR selaku Dosen Pembimbing 2 penulis yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Kepada Bapak Kurniawan Wijayanto, ST selaku Kabid Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang telah membantu penulis saat melakukan penelitian.
8. Kepada Bapak Sihabuddin Kholiq, ST selaku Pengelola Teknik Kontruksi Berkelanjutan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Kepada Ibu Ni'mah Hidayati, ST selaku Surveyor Pemetaan Ahli Muda yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Kemudian teman teman kuliah saya atas nama Alvin Fernanda Ws, Rif'an Yusuf Saifulloh, Yusuf Agus Fian, Dicka Abi Pratama, Reza Nur Hidayah, Chriswulan Wijaya, Afrida Putri Maulidyah, Amin Fajar Shaddiq, Dwi Prayuda, Mahmud Hidayat yang selalu ada untuk saya dalam mendukung penyelesaian skripsi dan selalu





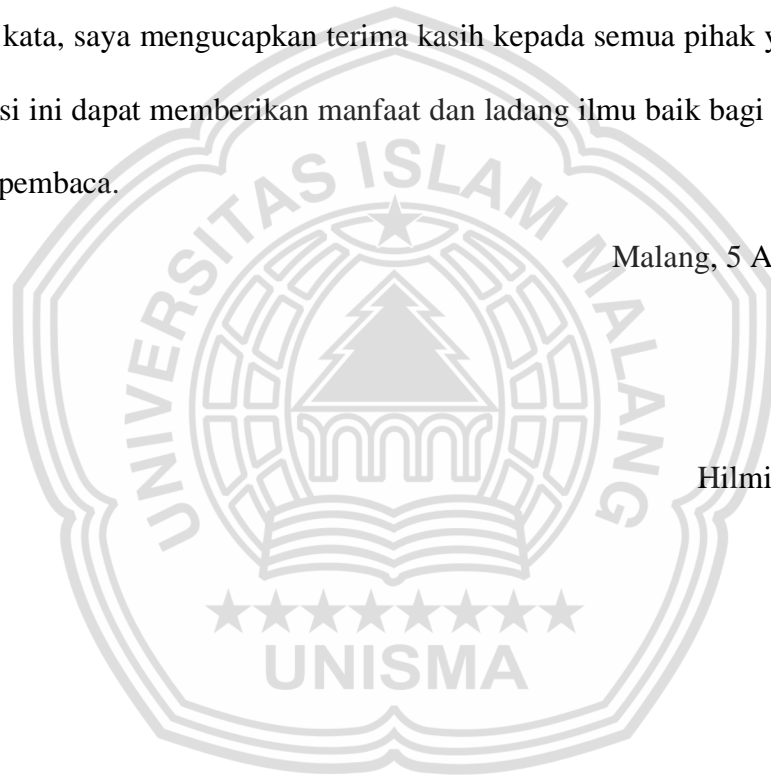
mendengarkan keluh-kesah saya serta tidak pernah lelah memberikan motivasi, semangat dan nasehat untuk saya

11. Teman teman saya atas nama Ahmad Syafaad, Very Teguh Anugra, Muhammad Imam Suparto, Yuhan Wijaya Alamsyah, Indah Ramadhana, Firyal 'Azizah, Devi Putri Rachmawati, Adelia Fajar Melita yang mendukung dalam penyelesaian skripsi dan memberikan motivasi, semangat dan nasehat untuk saya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ladang ilmu baik bagi saya sendiri maupun bagi pembaca.

Malang, 5 Agustus 2023

Hilmi Ainul Fajar



## BIODATA PENULIS

Nama : Hilmi Ainul Fajar

NPM : 21801091161

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 28 September 1999

Alamat : Jl. Sidotopo RT/RW. 04/11

Desa. Dilem Kec. Kepanjen Kab. Malang

E-mail : hilmifajar12@gmail.com



Pendidikan :

No	Nama Sekolah	Tahun Pendidikan
1.	SDNU HASANUDDIN DILEM 02	2006-2012
2.	SMPNU SUNAN GIRI KEPANJEN	2012-2015
3.	SMA NEGERI 01 SINGOSARI	2015-2018

Pengalaman :

1. Magang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jalan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk transportasi darat dalam melakukan kegiatan dari berbagai jenis bidang. Segala bentuk aktivitas masyarakat yang menggunakan transportasi darat pastinya diperlukan sebuah jalan yang baik dalam melakukan kegiatan. Jalan juga sangat berperan penting dalam mendukung segala aktivitas masyarakat, dimana jalan sebagai penghubung antara satu daerah ke daerah lainnya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 Bagian 1 jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

Jalan juga merupakan akses masyarakat dalam memenuhi sebuah kebutuhan, seperti kebutuhan dalam dunia pekerjaan atau bisnis, pendidikan, kesehatan atau rumah sakit. Keberadaan infrastruktur jalan sangat berperan penting dalam berjalannya proses roda perekonomian. (Rusliandy, 2020: 2).

Dengan adanya keberadaan infrastruktur jalan yang berperan penting dalam berjalannya proses roda perekonomian. Hal ini juga diungkapkan Susanto dalam Iskandar, dkk (2019: 59) yaitu infrastruktur sebagai penunjang atau pendukung pertumbuhan ekonomi, karena salah satu penunjang dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan ekonomi dalam pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang timbul dari pembangunan infrastruktur ditandai oleh pergerakan masyarakat dalam melakukan mobilitas distribusi barang dan jasa. Karena dengan adanya suatu pembangunan infrastruktur yang baik akan berdampak pada jaminan efisiensi, memperlancar suatu aktivitas pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan suatu nilai tambah dalam perekonomian (Prasetyo dan Firdaus dalam Panjaitan, 2019: 44). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan jalan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya dengan adanya bangunan jalan, bangunan jalan tersebut dapat mendukung roda perekonomian, menjunjang kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Jika tidak ada jalan atau jalan raya, maka kebutuhan masyarakat tersebut akan sulit untuk terpenuhi.

Disisi lain, untuk mendukung masyarakat pengguna jalan dalam melakukan mobilitas, kondisi jalan juga harus diperhatikan agar tidak mengganggu masyarakat dalam melakukan sebuah mobilitas atau kegiatan. Kondisi jalan yang rusak akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Dari kondisi tersebut akan menyebabkan suatu kemacetan hingga kecelakaan. Suatu kemacetan terjadi dikarenakan pengguna jalan memperlambat laju kendaraan karena jalan yang rusak. Begitupun kecelakaan sering kali terjadi dikarenakan masyarakat pengguna jalan tidak mampu mengontrol dan mengantisipasi kendaraan akibat jalan yang rusak tersebut.

Kondisi jalan yang rusak menjadikan kegiatan transportasi menjadi terkendala atau terhambat sehingga mempengaruhi mobilitas perekonomian masyarakat. Kerusakan transportasi barang bisa terjadi karena kendaraan mengalami kerusakan akibat beban jalan yang berlubang atau bergelombang, sehingga kendaraan mengalami kerusakan ketika melewati jalan yang rusak tersebut.

Kerusakan jalan yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Malang saat ini merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan harus segera di tangani. Kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu-lintas. Kerusakan jalan yang terjadi di Indonesia sering kali dikarenakan kurangnya perhatian aparaturnya penyelenggara dalam pelaksanaan perbaikan jalan

Permasalahan atau fenomena kerusakan jalan telah terjadi di Kabupaten Malang terkait kerusakan jalan ditandai oleh presetasi panjang jalan menurut kondisi jalan yang membuktikan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Malang terdapat kerusakan. Hal tersebut dibuktikan dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1 Panjang jalan menurut kondisi jalan dalam kilometer**

Kondisi	Panjang Jalan (km)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Baik	1,041.130	836.277	1109.212	1113.872	1005.502
Sedang	79.785	311.275	147.41	142.68	210.27
Rusak Ringan	282.655	150.82	403.54	407.81	332.22
Rusak Berat	265.192	370.39	8.6	4.4	120.77
Jumlah	1,668.762	1668.762	1668.762	1668.762	1668.76

Sumber : Satu Data Kabupaten Malang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang

Sejalan dengan itu permasalahan tentang krusakn jalan yang terjadi di Kabupaten Malang berawal dari keluhan masyarakat tentang adanya kecelakaan di jalan Dr.Ir.Soekarno Kabupaten Malang yang disebabkan oleh jalan yang berlubang, kecelakaan akibat kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Malang tidak terjadi sekali ataupun dua kali. Dilansir di dalam seru.co.id, keluhan tentang adanya kecelakaan di jalan tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Fraksi Gerindra. Anggota Dewan Fraksi Gerindra tersebut memohon kepada pemerintah setempat agar segera melakukan perbaikan jalan. Permasalahan tentang adanya kerusakan jalan juga terjadi pada saat adanya keluhan masyarakat tentang kondisi jalan yang berlubang dan menyebabkan kecelakaan sudah terjadi pada 2021. Sehingga bisa dinyatakan program pemeliharaan jalan masih belum terlaksana.

**Gambar 1 Keluhan Masyarakat Terhadap Kerusakan Jalan**



Sumber : Media Online Seru (<https://seru.co.id/64758-makan-korban-anggota-dewan-serukan-perbaikan-jalan-jalibar>)

Kemudian dari fenomena kerusakan jalan yang terjadi, hal tersebut juga diperkuat dengan data presentase kondisi jalan di Wilayah Kabupaten Malang selatan berdasarkan tingkat kerusakan yang dibuktikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2 Pemeliharaan Jalan Wilayah Malang Selatan 2023**

Ruas	Panjang Jalan	Tingkat Kerusakan
Kepanjen – Pagak – Donomulyo – Ngliyep	42 KM	30 %
Gondanglegi – Balekambang	33 KM	30 %
Talok – Druju – Sendang Biru	42 KM	30 %
Karangkates – Kalipare – Donomulyo	35 KM	30 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Dari beberapa data yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian pelayanan terhadap perbaikan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan terlambatnya proses pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi berbagai permasalahan tentang jalan maka jalan tersebut sangat diperlukan perhatian atau perbaikan. Perbaikan jalan merupakan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi terkait kerusakan jalan karena melihat keadaan jalan di Kabupaten Malang sudah sangat butuh perbaikan dalam waktu dekat agar tidak terjadi lagi permasalahan seperti kecelakaan.

Disamping itu pelaksanaan kebijakan juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 97 disebutkan bahwa penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya. Maka dari itu Pemerintah selaku organisasi penyelenggara program pemeliharaan jalan wajib melakukan perawatan jalan sesuai dengan kebijakan tersebut.

Sejalan dengan itu definisi kebijakan menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Joko Widodo (2021: 11) mendefinisikan kebijakan sebagai “*a projected program of*

*goal values and practice*”. yang artinya sebuah program yang diproyeksikan dari nilai dan praktik tujuan.

Proyeksi kebijakan yang sesuai dengan tujuan merupakan sebuah upaya dalam pemecahan permasalahan dalam masyarakat. Menurut Mustopadidjaja dalam Hayat (2019: 10-20) menyebutkan kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kesamaan definisi tersebut juga diungkapkan menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan dalam Taufiqurakhman (2014: 4) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya suatu permasalahan dari suatu kondisi dalam masyarakat atas ketidakpuasan dalam kehidupan dalam masyarakat .

Kemudian dalam upaya melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan program pemeliharaan jalan. Peraturan mengenai pelaksanaan program pemeliharaan jalan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan . Peraturan tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan. Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Bagian 1 tersebut disebutkan bahwa pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai . Selain itu, dalam peraturan tersebut juga terdapat program



penilikan jalan. Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Bagian 18 disebutkan bahwa penilikan jalan adalah kegiatan pelaksanaan, pengamatan, pemanfaatan jalan dan kondisi jalan setiap hari dan laporan pengamatan serta usulan tindakan terhadap hasil pengamatan disampaikan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang ditunjuk .

Dari kebijakan tersebut dan melihat adanya suatu permasalahan tentang jalan dikabupaten malang dapat disimpulkan bahwa penyelenggara kebijakan memiliki kewajiban melaksanakan atau meng implemmentasikannya sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur dalam kebijakan pemeliharaan jalan. Jalan yang telah mulai mengalami kerusakan apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan kerusakannya semakin parah. Oleh karena itu diperlukan suatu implementasi kebijakan pemeliharaan jalan oleh instansi terkait agar tidak membahayakan masyarakat pengguna jalan karena pada dasarnya pemerintah selaku organisasi penyelenggara urusan pelaksanaan pemeliharaan jalan mempunyai kewajiban memelihara jalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan.

Sejalan dengan itu konsep implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Subianto (2012:18) memberikan pengertian implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Definsi lain mengenai implementasi kebijakan terdapat dalam Hayat (2018: 85) adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksanaa kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.. Sedangkan menurut Charles O Jones dalam Tahir (2014:81) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah

tindakan pemerintah atas permasalahan publik yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.

Selanjutnya agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai tujuan yang telah dimaksudkan. Proses suatu implementasi kebijakan diperlukan indikator dalam mengukur keberhasilan dalam proses pelaksanaannya. Indikator keberhasilan tersebut digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses pelaksanaannya. Banyak model indikator implementasi kebijakan publik yang dapat dipilih. Masing- masing memiliki kelebihan dan kekurangan.. Model implementasi kebijakan salah satunya adalah menurut Van Meter dan Van Horn dalam Tahir (2014:71) yang menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik..

Maka dari itu untuk melakukan suatu penerapan program kebijakan pemeliharaan jalan dan penilikan jalan, model implementasi kebijakan tersebut bisa digunakan untuk pedoman dalam proses pelaksanaannya. Melalui pedoman model implementasi tersebut bisa diproyeksikan oleh implementor yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan dalam implementasi kebijakan melalui program pemeliharaan jalan dan penilikan jalan yang merupakan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi terkait kerusakan jalan .

Oleh karena itu dari paparan kebijakan tentang pemeliharaan jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang mempunyai kewajiban meng-implementasikan kebijakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang yang diharapkan akan membuat mobilitas masyarakat atau kegiatan masyarakat tidak terganggu lagi oleh kerusakan jalan.

Dari upaya implementasi kebijakan melalui program pemeliharaan jalan dan penilikan jalan maka diharapkan dapat meningkatkan, membentuk, dan menjadikan kawasan Kabupaten Malang memiliki perkembangan perekonomian tanpa menimbulkan permasalahan yang cukup berarti.

Berdasarkan dari beberapa fenomena yang terjadi dan diangkat sebagai penelitian. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program pemeliharaan jalan dan penilikan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang dan apa saja kendala dalam implementasi program pemeliharaan jalan dan penilikan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang.

Oleh karena itu merujuk kepada permasalahan atau fenomena tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Kabupaten Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang” .

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan dan dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemeliharaan dan penilikan jalan Kabupaten di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi pemeliharaan dan penilikan jalan Kabupaten di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemeliharaan dan penilikan jalan Kabupaten di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi pemeliharaan dan penilikan jalan Kabupaten di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang..

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Malang. Dan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang pemahaman strategi terkait dengan strategi pemeliharaan jalan dan penilikan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina dan Marga Kabupaten Malang.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan perbaikan jalan atau pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang dan tentunya memberikan solusi atas keluhan masyarakat terhadap kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Malang.

###### b. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini maka diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam sistem pemerintahan khususnya dalam bidang Administrasi Publik, serta memberikan

pengalaman secara langsung tentang fakta di lapangan dengan teori yang telah di peroleh selama di bangku perkuliahan.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi refrensi, masukan dan menambah wawasan akan strategi pemeliharaan yang dilakukan oleh Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga terhadap kerusakan jalan.

**E. Sistematika Pembahasan**

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang konteks penelitian yang berisi alasan dari penyusun mengambil penelitian ini, fokus penelitian berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian adalah sesuatu yang dicapai dari sebuah penelitian, definisi operasional berisi istilah-istilah dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam judul skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang uraian tentang Tinjauan Pustaka terdahulu dan mengenai uraian Kajian Teori tentang Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Infrastruktur dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan

3. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya dan didalamnya juga ada Jenis Penelitian yang di gunakan, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian dan Setting Penelitian, Sumber Data yang digunakan penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Keabsahan Data.

4. Bab IV Gambaran Setting Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang Gambaran Setting Penelitian. Gambaran setting penelitian merupakan penjelasan mengenai lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

#### 5. Bab V Temuan - Temuan Penelitian

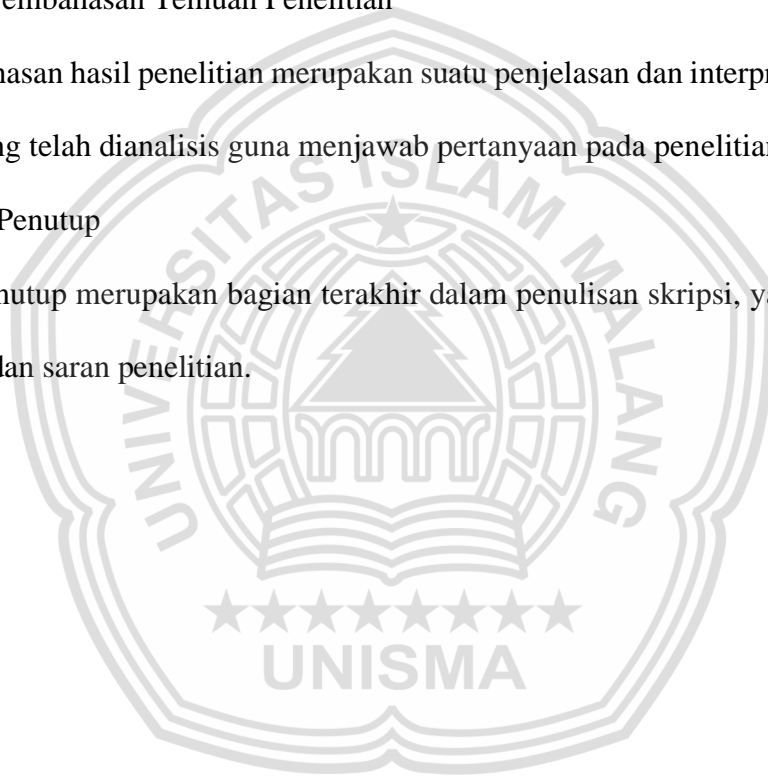
Bab ini berisi temuan penelitian. Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### 6. Bab VI Pembahasan Temuan Penelitian

Pembahasan hasil penelitian merupakan suatu penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitian.

#### 7. Bab VII Penutup

Bab penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran penelitian.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan tentang pemeliharaan dan penilikan jalan berguna untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban masyarakat pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Upaya pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai pemberian pelayanan berupa perbaikan, pencegahan kondisi jalan agar tidak mengalami kerusakan. Implementasi Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Kabupaten Malang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dengan menggunakan indikator teori Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tersebut hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Malang sudah terlaksana, akan tetapi dalam beberapa aspek terdapat keterhambatan. Adapun Implementasi Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Kabupaten Malang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. **Implementasi Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Kabupaten Malang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang**

Berdasarkan hasil identifikasi implementasi yang diukur melalui indicator implementasi yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan di Kabupaten Malang sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan kebijakan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, kekurangan tersebut ditandai adanya hambatan didalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya financial. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan minimnya sumber daya finansial berdampak pada jalannya pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan. Dari hambatan tersebut berdampak pada hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan tidak sesuai yang diharapkan.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemeliharaan dan Penilikan Jalan Kabupaten Malang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang**

Berdasarkan hasil identifikasi implementasi yang diukur melalui indicator implementasi yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menyimpulkan bahwa, pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang telah dilaksanakan namun pada pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat banyak hambatan. Hambatan tersebut terletak



berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan yaitu faktor yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan terletak pada minimnya sumber daya yang dimiliki, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan minimnya sumber daya finansial berdampak pada jalannya pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan. Dari hambatan tersebut berdampak pada hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan tidak sesuai yang diharapkan.

Namun dibalik itu adanya faktor pendukung yang dapat mendukung berjalannya pelaksanaan pemeliharaan jalan. Faktor pendukung tersebut terletak pada adanya pengelola sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang. Faktor pendukung melalui bimbingan teknis tersebut berguna untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan mengatasi hambatan hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka hal yang dapat menjadi perhatian khusus adalah dengan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan bimbingan teknis terkait evaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penilikan jalan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
2. Mengoptimalkan lagi kinerja yang telah dilakukan serta harus disertai pemantauan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, jadi tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang Undang (UU) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006. Tentang Jalan.

Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 . Tentang Pelayanan Publik

### B. BUKU

Kusumastuti, Khoiron. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), Kota Semarang.

Subianto, Agus. (2020) *Kebijakan Publik*, PT Menuju Insan Cemerlang, Brilliant, Landmark Modern Shop House A-17 Jl. Indragiri 12-18, Surabaya.

Palilu, Aram. (2022) *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto*, CV. AZKA PUSTAKA, Kab. Pasaman Barat; Sumatera Barat 26566.

Tahir, Arifin. (2015) *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, CV ALFABETA BANDUNG, Jl. Gegerkalong Hilir No. 84, Bandung .

Handoyo, Eko. (2012) *Kebijakan Publik*, Widya Karya Semarang, Semarang.

Eliana. (2006) *Teori Organisasi*, Jayabaya University Press, Cetakan Pertama Oktober, Jakarta.

Hayat. (2017) *Manajemen Pelayanan Publik*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Hayat. (2018) *Reformasi Kebijakan Publik “Perspektif Makro dan Mikro”*, Jakarta : PRENADAMEDIA GRUP, 2018.

Hayat. (2017) *Kebijakan Publik Evaluasi Reformasi Formulasi*, Malang : Citra Intrans Selaras.

Honing. (1977) *Konstruksi Jalan Raya*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat,

Widodo, Joko. (2021) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Media Nusa Creative (MNC Publishing).

- Jumroh, Pratama. (2021) *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*, Insan Cendekia Mandiri, Perumahan Gardena Maisa 2, Blok F03, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat.
- Alamsyah, Kamal. (2016) *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, Media Citra Mandiri Press, Jl. Buah Batu, Bandung.
- Rusliandy. (2020) *Pengelolaan Infrastruktur Jalan Kabupaten Dari Perspektif Dynamics Governance*, CV Amerta Media, Banyumas..
- Marman. (2022) *Manajemen Infrastruktur Bidang Survey Jalan*, Yayasan Wiyata Bestara Samasta, Cirebon, halaman 13.
- Pramono, Joko. (2020) *Implementasi Dan Evaluasikebijakan Publik*, Unisri Press, Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta.
- Anggara, Sahya. (2014) *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia Bandung, Jl. BKR Lingkar Selatan, Bandung
- Situmorang, H Chazali. (2016) *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*, Social Security Development Institute (Ssdi), Pesona View Blok B-8 Jl. Ir. H. Juanda, Kota Depok
- Siyoto, Sodik. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Cetakan 1, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan RnD*, Cetakan ke-19, Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tachjan. (2006) *Implementasi Kebijakan Publik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006.
- Taufiqurokhman. (2014) *Kebijakan Publik “Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan”*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Cetakan Ke I, Jakarta.
- Trenggono . (2005) *Teknik Pengelolaan Jalan, Balai Bahan dan Perkerasan Jalan – Puslitbang Prasarana Transportasi*, Cetakan Ke I, Bandung.
- Mustari, Nuriyanti (2015) *Pemahaman Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, LeutikaPrio, Yogyakarta.
- Uddin, Hudson, C. G. Haas. (2013) *Publik Infrastructure Asset Management, Second Edition*, McGraw Hill Professional.

Kadji, Yulianto (2015) *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, Ung Press Gorontalo, Cetakan Ke I, Gorontalo.

### C. SKRIPSI

Evaluasi Dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Takalar Oleh Krisdayanti (2018)

Implementasi Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Watampone Kabupaten Bone Oleh Wirdayanti (2021)

Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Kabupaten Di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang Oleh Desi Apriliah (2021)

### D. JURNAL

Ponto, Pioh, Tasik, (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Edisi XX* (<https://media.neliti.com/media/publications/98445-ID-implementasi-kebijakan-program-pembangun.pdf>) ) diakses pada tanggal 12 Desember 2022

Amalia, Afiffudin, Hayat. (2019) Implementasi E-Document Dalam Pengelolaan Surat Masuk Dan Keluar, *Jurnal Respon Publik Volume 13, ISSN 2302-8432 Hal 10-20.* ([https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=NPakhIkAAAAJ&citation\\_for\\_view=NPakhIkAAAAJ:GnPB-g6toBAC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=NPakhIkAAAAJ&citation_for_view=NPakhIkAAAAJ:GnPB-g6toBAC)) (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022)

Lestari, Riyanto, Adiono, (2015) Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi Pada Pavingisasi Jalan Desa Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro) , *Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 3, No. 5, Hal. 800-806* (<https://www.neliti.com/id/publications/81843/Implementasi-Kebijakan-Pembangunan-Infrastruktur-Perdesaan-Studi-Pada-Pavingisasi>) Diakses Pada Tgl 2 November 2022.

- Purwastuti, Cikusin, Hayat. (2021) Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis Good Governanc, *Jurnal Respon Publik*, ISSN: 2302-8432 Vol. 14, No. 1, Tahun 2020, Hal: 60-67  
([https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=NPakhIkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation\\_for\\_view=NPakhIkAAAAJ:ldfaerwXgEUC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=NPakhIkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=NPakhIkAAAAJ:ldfaerwXgEUC)) (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022)
- Hasrillah, Cikusin, Hayat. (2021) Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Bpjs Kesehatan, *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.12 SSN 2722-9467*  
([https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=NPakhIkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation\\_for\\_view=NPakhIkAAAAJ:UxriW0iASnsC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=NPakhIkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=NPakhIkAAAAJ:UxriW0iASnsC)) (diakses pada tanggal 8 Agustus 2022)
- Panjaitan, Mulatsih, Rindayati. (2019) Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Juli 2019, 8(1): 43-61  
(<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/issue/view/2540>) diakses pada tgl 11 November 2022
- Iskandar , Nuraini (2019) Pengaruh Infrastruktur Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Langsa, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 1, April 2019.  
(<https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/1298>) diakses pada tgl 11 November 2022.
- Julianti, Kristiawan, Adiputra (2021) Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Di Tanjungpinang Tahun 2017-2018 (Studi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011), *Student Online Journal, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021* (<https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/768>) (diakses pada 9 Oktober 2022)
- Krisdayanti, (2021) Evaluasi Dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Takalar Oleh Krisdayanti (2018) Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, ([https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1587-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1587-Full_Text.pdf)) (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022)
- Mamonto, Sumampouw, Undap (2018) , Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan

Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Eksekutif Issn : 2337 - 5736 Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Hal 6  
(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Jurnaleksekutif/Article/View/21950>)

Diakses Pada Tgl 2 November 2022.

Kristiawan, Dewi, Suharso (2020), Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang) , *Borobudur Law Review* Vol. 2 No. 1 (2020) pp. 30-39 ISSN:2723-052X  
(<https://journal.unimma.ac.id/index.php/burrev/article/view/3919>) (diakses pada tanggal 9 Oktober 2022)

Pradana, Muchsin, Hayat, 2021, *Evaluasi Kebijakan Tata Kelola HPPM Oleh Badan Usaha Milik Desa Dewarejo Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Action Research Literate*, p-ISSN : 2613-9898 e-ISSN : 2808-6988, Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2021  
([https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=NPakhIkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation\\_for\\_view=NPakhIkAAAAJ:fQNAKQ3IYiAC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=NPakhIkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=NPakhIkAAAAJ:fQNAKQ3IYiAC)) (diakses pada tanggal 6 Agustus 2022)

Ainiah, Afifuddin, Hayat (2021) Implementasi Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) Di Rw I Kelurahan Polowijen, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No.12 Mei 2021, ISSN 2722-9467  
([https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=NPakhIkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation\\_for\\_view=NPakhIkAAAAJ:P5F9QuxV20EC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=NPakhIkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=NPakhIkAAAAJ:P5F9QuxV20EC)) (diakses pada tanggal 8 Agustus 2022)

Marwansyah, Megasari (2021) Kualitas Inspeksi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Tingkat Kecelakaan Kerja, *Jurnal Perspektif*, VOL. X NO.2 SEPTEMBER 2021,  
(<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/5420>) diakses pada 9 Januari 2023

Wirdayanti, (2021) Implementasi Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Watampone Kabupaten Bone (2021), Universitas Muhammadiyah Makassar,



([https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13606-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13606-Full_Text.pdf) ) (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022)

Nuryaman (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Di Objek Wisata Pantai Batukaras Kabupaten Pangandaran, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2019 (<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3083>) diakses pada tanggal 16 Januari 2023

Ransun, Kalangie, Sendow (2017) Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah, *Jurnal Eksekutif Universitas Sam Ratulangi*, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15560/0>) Diakses Pada Tgl 2 November 2022.

